

N K P, MERUPAKAN PASPOR KESEHATAN MASYARAKAT POLRI.

Oleh

Djoko Ismoyo *)

PENDAHULUAN

Anggota Polri yang baik adalah yang selalu tahu tentang kondisi fisik dirinya, sehingga akan mendapat gambaran mengenai apa yang seharusnya boleh dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari (tentunya kaitannya dengan beban tugas).

Dalam segala hal, informasi merupakan kunci keberhasilan tentang rencana suatu tindakan, tak terlepas juga informasi tentang kesehatan.

NKP bagi masyarakat Polri memang bukan hal baru. Persepsi terhadap keberadaan buku Naskah Kesehatan Perorangan (NKP) ini buat sesama sejawat tak ada masalah, yang menjadi masalah mungkin sejauh mana masyarakat Polri secara umum mengetahui akan kepentingan buku naskah ini.

Supaya terdapat persepsi yang seragam, terutama bagi masyarakat Polri non medis, dan agar jangan rancu dengan begitu banyaknya istilah yang sekarang banyak dipakai, mulai rekaman medik, catatan medik, MR (medical record), dokumen medik sampai paspor kesehatan dalam tulisan ini dicoba untuk menjabarkannya.

PENGERTIAN

Naskah Kesehatan Perorangan adalah merupakan catatan ringkas mengenai hasil pemeriksaan kesehatan anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri. NKP ini penting karena merupakan dokumen medik yang fungsinya bisa sebagai sarana komunikasi antara Dokter dengan anggota pemegang NKP tersebut atau sesama sejawat kesatuan lain, yang akan membantu memberikan informasi tentang status kesehatan/keadaan kesehatan anggota baik riwayat sebelumnya maupun keadaan sekarang.

Informasi lengkap ini dapat membantu dokter untuk secara cepat dan tepat mengambil sikap dalam upaya diagnosis dan memberikan saran tindak/pengobatan selanjutnya.

Pemeriksaan kesehatan yang teratur bagi masyarakat Polri selalu diusahakan secara berkala, yang hasil resume pemeriksaan ini biasanya yang diisikan ke dalam buku NKP tersebut. Namun sebenarnya ini bukan satu-

*) Dr. Lettu Pol, Kanit Dokpol Polda Istimewa Aceh

satunya usaha dalam menentukan status kesehatan anggota, karena catatan kunjungan Poliklinik secara insidental karena keluhan kesehatan yang disampaikan juga merupakan sumber informasi yang berguna untuk menunjang/melengkapi hasil yang didapat waktu pemeriksaan berkala. Catatan kunjungan ini sendiri sudah merupakan status medik yang sangat penting karena merupakan keluhan langsung yang diberikan anggota kepada dokter pemeriksa mengenai keadaan dirinya. Dan ini sebenarnya merupakan rujukan informasi yang semestinya dapat menjembatani upaya menuju terselenggaranya bentuk resume data medik yang merupakan suatu dokumen yang disebut N K P.

NKP merupakan "paspor" karena buku/naskah ini merupakan dokumen berharga yang tentunya juga rahasia, penyimpanannya pun tertentu, tidak sembarangan dan bisa dibawa ke mana mana kalau memang diperlukan (pindah, pendidikan dan lain-lain), oleh karena itu tidak berlebihan kiranya apabila Naskah Kesehatan Perorangan ini disebut sebagai paspor kesehatan. Karena namanya paspor, maka materi yang ada di dalamnya harus dibuat dengan didasari rasa tanggung jawab yang besar sehingga benar-benar merupakan petunjuk kronologis tentang kesehatan diri pemiliknya. Dan seharusnya NKP ini wajib dipunyai setiap anggota Polri/PNS Polri.

KEPENTINGAN

Sesuai dengan tujuan diadakannya buku Naskah Kesehatan Perorangan bagi anggota/masyarakat Polri, di samping diketahui data pribadinya secara umum juga di dalam buku ini didapatkan informasi riwayat kesehatan yang bersangkutan.

Kalau kita amati secara seksama di dalam buku naskah kesehatan perorangan (menurut pandangan penulis) tak perlu ada kontraversi pendapat (masalah Etika) tentang pandangan hak mendapat informasi keadaan dirinya dengan hak dokter untuk menutupi keadaan yang diketahuinya, karena di dalam buku NKP ini tak disinggung/ditentukan diagnosenya, hanya klasifikasi/status golongan saja. Inilah sebabnya, mengapa (mungkin?) NKP ini bisa disimpan/dibawa yang bersangkutan, karena toh diagnosenya tak ada. Karena dengan diketahui diagnose, maka mungkin timbul dampak psikologis pada penderita/ yang bersangkutan. Diagnose hanya dapat diketahui apabila yang bersangkutan mengkonsultasikan hasil pemeriksaan yang telah dijalani ke dokter (berarti telah ada persetujuan).

Berlainan dengan eatatan penderita/pasien yang ada di rumah sakit, karena di samping data lengkap mengenai evaluasi kesehatannya, diagnose dan juga terapinya. Sehingga sebenarnya tidak perlu ada sementara pendapat yang

mempersoalkan bagaimana lalu etika jabatan dokter dengan adanya paspor kesehatan ini? Satu sama lain sangat berbeda. Yang jelas keberadaannya harus dimengerti setiap masyarakat Polri sendiri.

NKP merupakan indikator masukan untuk melakukan evaluasi medis maka harus dimengerti kepentingan secara rinci, yaitu sesuai tata cara penggunaan buku naskah kesehatan perorangan sebagai berikut:

1. Buku ini memuat data kesehatan perorangan anggota/PNS Polri sebagai resume hasil pemeriksaan kesehatan; berarti setiap anggota akan dapat mengetahui keadaan status kesehatannya (salah satu aspek kepentingan pribadi).
2. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Dokter Kesatuan/Pejabat Dokkes yang ditunjuk; ini berarti bahwa seandainya ada usaha untuk menutupi kekurangan/keadaan status anggota dapat dihindari (menghindari pemaksaan untuk kepentingan/tujuan tertentu).
3. Buku ini diisi catatan baru setiap kali yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan kesehatan; ini berarti evaluasi secara berkala guna mengetahui perkembangan/perjalanan penyakitnya sehingga dapat terkontrol terus.
4. Pemeriksaan Kesehatan yang lebih intensif dapat diberikan secara selektif disesuaikan dengan azas prioritas dan dana yang tersedia; berarti pemeriksaan spesialis dimungkinkan walaupun dengan skala prioritas.
5. Naskah ini disimpan oleh Disdokkes setempat untuk dibina oleh Dokter/Pejabat Dokkes Kesatuan; berarti di samping untuk memudahkan pendataan (up dating), evaluasi juga karena naskah ini sebenarnya diperlakukan sebagai surat/dokumen rahasia.
6. Setiap kali pemilik pindah kesatuan, maka buku Naskah Kesehatan Perorangan ini dibawa dan diserahkan untuk dikelola oleh Disdokkes di kesatuan yang baru; berarti sebagai bahan komunikasi-informasi antar sejawat dokter di kesatuan lain dan diharapkan sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam penugasan nantinya.
7. Naskah ini diperlakukan sebagai Surat "RAHASIA", berarti ini merupakan barang berharga baik untuk dirinya maupun kesatuannya sehingga tak salah kalau ini disebut sebagai paspor kesehatan.

PENUTUP

Usaha untuk mendapatkan hak informasi tentang kesehatan bagi masyarakat Polri harus dapat dimengerti lewat keberadaan NKP ini.

Betapapun Naskah Kesehatan Perorangan ini dapat menjadi alat komunikasi yang baik bagi pemilik ataupun sesama sejawat dokter, kalau tanpa motivasi hanya akan merupakan simbol belaka. Untuk itu mari kita upayakan keberadaannya walaupun tidak bisa berbentuk buku, karena disadari bahwa distribusi buku NKP belum memungkinkan menjangkau seluruh masyarakat Polri.



Forum Kontak Daerah

PENYELIDIKAN WABAH PADA KASUS KERACUNAN MAKANAN DI BREBES TGL. 18 MARET 1989

Pada tanggal 21 Maret 1989, DISDOKKES POLDA JATENG mendapat tugas untuk mengadakan penyelidikan wabah kasus keracunan makanan di kota Brebes, Jawa Tengah.

Wabah keracunan makanan tersebut telah terjadi di desa Kalingongso Wetan, Kecamatan Brebes, Jumlah korban diperkirakan sekitar 500 orang dan belasan orang perlu dirawat.

KA DISDOKKES POLDA Jateng, Letkol Pol. dr. Budiarto Ms. beserta Mayor Pol. Maryono, telah mengadakan penyelidikan secara epidemiologis pada kejadian wabah tersebut. Kegiatan penyelidikan tersebut mendapat bantuan dari pejabat-pejabat setempat, muspika, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Puskesmas setempat.

Hasil analisa data yang terkumpul menunjukkan bahwa tempe bumbon merupakan penyebab keracunan makanan yang terjadi. Diduga terjadi kontaminasi obat insektida pada waktu proses pembuatan tempe yang tempatnya berdekatan dengan tempat penyimpanan obat tersebut.

